



Judul : Pengelolaan Anggaran Perlu Diperbaiki
Tanggal : Rabu, 23 Juni 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 9

Pengelolaan Anggaran Perlu Diperbaiki

BPK soroti peningkatan utang pemerintah selama pandemi covid-19.

M ILHAM RAMADHAN
ilham@mediaindonesia.com

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apalagi di masa pandemi covid-19 ini, pengambil kebijakan banyak melakukan realokasi belanja.

Hal itu disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Rapat Paripurna DPR Sidang ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021, kemarin.

"BPK merekomendasikan pemerintah untuk melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang untuk segera ditindaklanjuti," tuturnya.

Ada beberapa hal yang menjadi temuan BPK terkait dengan

program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2020. Di antaranya, pemerintah belum menyusun pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menjalankan program tersebut.

BPK juga mendapati realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam program PC-PEN 2020 dinilai tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan lainnya terkait pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai.

Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga kredit KUR dan non-KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam kerangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program. Sehingga terdapat sisa dana kegiatan yang masih belum disalurkan sebesar Rp6,77 triliun.

Adapun permasalahan yang

tidak berkaitan dengan kegiatan PC-PEN, BPK mendapati enam permasalahan. Di antaranya, laporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun dan US\$8,26 juta, serta kewajiban negara minimal sebesar Rp16,59 triliun, sesuai basis akuntansi aktual, serta saldo piutang kedaluwarsa sebesar Rp1,75 triliun.

BPK juga menyoroti peningkatan utang pemerintah selama pandemi covid-19 merebak.

"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," tuturnya.

Indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan International Monetary Fund (IMF) maupun *international debt relief* (IDR).

BPK mendapati *ratio debt*

service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% hingga 35%.

Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% juga melampaui rekomendasi IDR dan IMF. Serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92% hingga 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90%-150%.

Terus memperbaiki

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menuturkan BPK berpendapat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang disajikan pemerintah tidak memiliki salah saji yang bersifat material.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara baik dari sisi penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawabannya yang disampaikan melalui laporan keuangan pemerintah," terang Rahayu. (E-1)